

BAB V
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1. Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni	1. Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	1. Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	1. Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	1. Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam	2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam	2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam	2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam	2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam
3. Fasilitas Penyediaan rumah bagi korban akibat program pembangunan	3. Fasilitas Penyediaan rumah bagi korban akibat program pembangunan	3. Fasilitas Penyediaan rumah bagi korban akibat program pembangunan	3. Penyediaan rumah umum dan rumah khusus	3. Fasilitas Penyediaan rumah bagi korban akibat program pembangunan
4. Penyediaan rumah umum dan rumah khusus	4. Penyediaan rumah umum dan rumah khusus	4. Penyediaan rumah umum dan rumah khusus	4. Fasilitas Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	4. Penyediaan rumah umum dan rumah khusus
5. Fasilitas Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	5. Fasilitas Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	5. Fasilitas Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	5. Peningkatan dukungan pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan	5. Fasilitas Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan
6. Peningkatan dukungan pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan	6. Peningkatan dukungan pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan	6. Peningkatan dukungan pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan	6. Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi	6. Peningkatan dukungan pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan
7. Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi	7. Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi	7. Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi	7. Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	7. Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi
8. Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	8. Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	8. Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	8. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman	8. Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman
9. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman	9. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman	9. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman	9. Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	9. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
10. Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	10. Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	10. Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	10. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	10. Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
11. Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	11. Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	11. Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	11. Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah	11. Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
12. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	12. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	12. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	12. Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat	12. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
13. Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah	13. Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah	13. Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah	13. Fasilitas penanganan permasalahan pertanahan	13. Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah
14. Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat	14. Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat	14. Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat	14. Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	14. Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat
15. Fasilitas penanganan permasalahan pertanahan	15. Fasilitas penanganan permasalahan pertanahan	15. Fasilitas penanganan permasalahan pertanahan	15. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi	15. Fasilitas penanganan permasalahan pertanahan
16. Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	16. Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	16. Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	16. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	16. Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
17. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi	17. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi	17. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi	17. Pelayanan dan peningkatan kapasitas kepegawaian	17. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi
18. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	18. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	18. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	18. LAKIP	18. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
19. Pelayanan dan peningkatan kapasitas kepegawaian	19. Pelayanan dan peningkatan kapasitas kepegawaian	19. Pelayanan dan peningkatan kapasitas kepegawaian	19. Peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan	19. Pelayanan dan peningkatan kapasitas kepegawaian
20. LAKIP	20. LAKIP	20. LAKIP	20. Fasilitas Penyediaan rumah bagi korban akibat program pembangunan	20. LAKIP
21. Peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan	21. Peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan	21. Peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan	21. Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	21. Peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan

BAB VI Strategi
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana, relokasi akibat program pemerintah, rumah umum dan rumah khusus beserta PSU-nya dalam rangka mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan
		Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
		Peningkatan rumah menjadi layak huni
	Meningkatnya kualitas kawasan	Pengembangan PSU
		Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
		Peningkatan keterpaduan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
		Pengurangan kawasan kumuh dalam rangka mendukung Peningkatan kualitas kawasan permukiman dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam rangka mendukung Peningkatan aspek pertanahan dalam pengembangan wilayah di KSP, PKN/PKW/PKWWp, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan
		Penanganan permasalahan pertanahan
		Peningkatan kapasitas masyarakat
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
		Peningkatan pelayanan kepegawaian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas pelaporan pelaksanaan

BAB VII-2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis)	Dokumen	1	1	1	4	4	4	4	17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah.	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah.	Paket	2	2	2	2	2	2	2	10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Paket	1	0	1	2	2	2	2	9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar	Orang	0	0	5	5	5	5	5	25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan informasi publik perangkat daerah	-	12	13	14	14	14	14	14	70	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	80	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	8	8	8	8	8	8	8	40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pembangunan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0	0	0.02	0.04	0.06	0.09	0.12	0.12	Bidang Perumahan
	Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	%	0.75	5.61	10.94	16.27	21.6	26.92	32.25	32.25	Bidang Perumahan
Perencanaan dan Pembiayaan Perumahan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Bidang Perumahan
Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya	Jumlah rumah yang ditangani	Unit	21985	23427	25677	25677	25677	25677	25677	128385	Bidang Perumahan
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya	Jumlah rumah terkena dampak bencana dan relokasi yang tertangani	Unit	0	0	150	150	150	150	150	750	Bidang Perumahan
Penanganan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	%	16.62	16.69	17	17.5	18	18.5	20	20	Bidang Kawasan Pemukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Lokasi	6	6	6	6	6	6	6	30	Bidang Kawasan Pemukiman
Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan	Dokumen	1	1	1	2	3	3	2	11	Bidang Kawasan Pemukiman
Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Bidang Kawasan Pemukiman
Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Dokumen	1	3	4	4	4	4	4	20	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	4	3	3	3	3	3	15	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	15	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pertanahan
Penanganan Permasalahan Pertanahan	Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani	%	100	100	20	20	20	20	20	100	Bidang Pertanahan
Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	%	0	20	20	20	20	20	20	100	Bidang Pertanahan
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan	Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	100	100	20	20	20	20	20	100	Bidang Pertanahan